



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax  
**BURANGA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA**  
**Nomor : 001/DP/2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“PAUD KUNCUP BAHARI”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Satuan Pendidikan **TK KUNCUP BAHARI** Menjadi **PAUD KUNCUP BAHARI**, Nomor 422/06/PAUD/KEB/2017 Tanggal 31 Desember 2017.  
2. Surat Permohonan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD KUNCUP BAHARI** a.n **DARWIAH** Selaku Pengelola Nomor 422/06/PAUD/KEB/2017, Tanggal 31 Desember 2017.

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan “**PAUD KUNCUP BAHARI**” yang terletak di **Desa Banu-Banua Jaya Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara** maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan anak Usia dini (PAUD);  
b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.  
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;  
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada saudari **DARWIAH** Selaku Pengelola **PAUD KUNCUP BAHARI** yang berkedudukan di **Desa Banu-Banua Jaya Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.**
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan Belajar tersebut diperpanjang Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 s/d 03 Januari 2019.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
  - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga  
Pada tanggal : 02 Januari 2018



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara Di Buranga ( Untuk Diketahui )
3. Direktur Jendral Paud-Dikmas Di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;
9. Arsip